

Islam Indonesia: Suatu Tawaran Model Keagamaan Di Dunia Islam

Oleh: Muhamad Bindaniji¹, Sadip Indra Irawan Sayuti²

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

muhamadbindaniji@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendedah model keagamaan masyarakat Indonesia yang distingsif dan memiliki karakter yang berbeda dengan model keagamaan masyarakat Islam lainnya. Fokus kajian ini adalah memberikan argumentasi bahwa Islam Indonesia dengan karakter moderat (*wasatīyah*) dapat menjadi tawaran model keagamaan umat Islam di seluruh dunia. Karakteristik moderasi Islam Indonesia dapat dilihat dari mengompromikan antara unsur universalitas Islam dengan lokalitas budaya Indonesia dan antara nasionalisme dan agama. Karakteristik ini terbentuk dari genealogi Islam yang dibawa Ulama Nusantara menekankan perdamaian dan meminimalisir kekacauan. Selain itu pengalaman mendirikan negara Indonesia yang melibatkan banyak elemen masyarakat dari berbagai suku, ras dan agama turut dalam proses pembentukan karakteristik Islam Indonesia. Kajian ini berkesimpulan bahwa model keagamaan Islam Indonesia dapat menjadi prototype keagamaan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat global dan memiliki peran signifikan bagi peradaban Islam secara universal.

Kata Kunci: *Islam Indonesia, Islam wasatīyah, Agama dan Budaya, Ulama Nusantara.*

Pendahuluan

Model Islam Indonesia dengan karakter moderat (*wasatīyah*) sangat dimungkinkan memiliki peran signifikan bagi peradaban Islam secara universal terutama melalui model keagamaan yang distingsif dengan model keagamaan di belahan dunia Islam lainnya. Islam Indonesia mempunyai bentuk ajaran yang toleran, mencintai nilai-nilai kedamaian dan menolak

* Alumni PPM UNUSIA Jakarta dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

* Dosen IAI Qamarul Huda Bagu

berbagai macam bentuk kekerasan, radikal, puritan, fundamental, dan liberal. Model keagamaan ini berasal dari genealogi Islam yang datang di Nusantara atau Indonesia yang lebih menekankan pada usaha penyesuaian unsur-unsur budaya bangsa dengan ajaran murni Islam. Unsur budaya, sejauh tidak melanggar ortodoksi Islam, akan diakomodasi ke dalam nilai-nilai agama. Atau bahkan unsur budaya yang secara eksplisit melanggar ajaran Islam, tetap dipertahankan dengan melakukan improvisasi berupa memasukkan unsur Islam ke dalam unsur budaya. Dengan cara seperti ini pada dasarnya unsur Islam akan menjadi unsur yang dominan dalam aktualisasi kebudayaan. Kesesuaian antara unsur budaya dan agama dalam penghayatan Islam Indonesia pada akhirnya menghasilkan bentuk pemahaman agama yang tidak ekstrim kanan ataupun kiri dan berada pada posisi moderat.

Beberapa dekade terakhir ini, bentuk dan model pemahaman Islam Indonesia telah menyita banyak perhatian di mata dunia. Azyumardi Azra berdalih, dorongan ini disebabkan oleh semakin dikenalnya Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di muka bumi dan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat.³ Dua faktor tersebut tampaknya menjadi stimulan utama sekaligus menjadi medan magnetik untuk meneliti Islam Indonesia secara lebih komprehensif dan menilai Islam Indonesia ditinjau dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama. Bagaimana respon masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, terhadap isu-isu sentral yang menjadi bahan perdebatan dan problem utama dalam kancah internasional yang sangat sukar dicarikan jawaban yang *rigid*, sebut saja dalam masalah demokrasi, HAM, dan terorisme. Berbagai permasalahan di dunia internasional tersebut menjadi tantangan besar, bagi

³ Azyumardi Azra, 'Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global', dalam Majalah *Prisma*, Vol. 29, No. 4, Oktober 2010, h. 83.

umat Islam untuk menemukan akar permasalahan dan mencari jalan keluar (*problem solving*). Tentu, faktor yang menjadi menarik dalam kaitannya dengan Islam Indonesia adalah bagaimana model keagamaan Islam di Indonesia dengan karakteristik *wasatīyah*nya menjawab isu-isu sentral di atas.

Karakteristik Wasatīyah Islam Indonesia

Konsep dan gagasan *wasatīyah* dalam Islam perlu dikemukakan karena dalam beberapa dekade terakhir banyak persepsi yang mengatakan wajah Islam keras, radikal, dan anti-damai. Momentum untuk mengatakan wajah Islam seperti itu membahana pasca tragedi bom 11 September 2001 di Amerika yang melibatkan penganut agama Islam sebagai terdakwa. Serangkaian bom bunuh diri, aksi teror, dan berbagai ancaman dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan ajaran agama Islam turut memerkeruh suasana dan sekaligus memantapkan bahwa agama Islam tidak ramah. Graham E. Fuller menulis buku dengan judul kontroversial yaitu *A World Without Islam* yang diterbitkan pada tahun 2010.⁴ Secara sekilas kita akan membuat asumsi bahwa judul tersebut merupakan bentuk pengandaian Fuller apabila di dunia ini tidak ada agama Islam. Apakah dunia akan aman, tidak terjadi tragedi bom atau serangkaian teror dan bentuk kekerasan lainnya. Walaupun jika dibaca secara komprehensif maksud Fuller sangat jauh dari kata pendeskriditan Islam di dunia, namun *mainset* masyarakat, khususnya dari kalangan Barat, tetap bersikukuh bahwa Islam merupakan agama yang tidak toleran dan damai.

Anggapan tersebut tentu tidak benar, karena Islam sangat menghargai keanekaragaman dalam berbagai bentuknya. Sikap menghargai itu yang akan menghasilkan gagasan *wasatīyah* sebagaimana tercantum dalam Surat al-

⁴ Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul yang lebih lunak, Graham E. Fuller, *Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam? Sebuah Narasi Sejarah Alternatif* (Bandung: Mizan, 2014).

Baqarah [2] ayat 143, ‘Dan dengan demikian kami [Allah] telah menciptakan kamu [kaum muslimin] sebagai *ummatan wasaʿatan* agar kamu sekalian dapat menjadi saksi bagi manusia lain’. Dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, konsep *ummatan wasaʿatan* seringkali disejajarkan dan diidentikkan dengan Islam *wasafiyah*, yaitu umat atau Islam yang berada di tengah, seimbang, tidak berdiri pada dua kutub ekstrem, baik dalam pemahaman maupun pengamalan Islam.⁵

Dalam konteks Indonesia, mengidentifikasi Islam Indonesia memiliki karakter *wasafiyah* sebenarnya harus merujuk pada perjalanan historis yang sangat panjang dari bangsa Indonesia, terhitung dari sejak Islam datang ke Nusantara, proses penyebaran Islam, sampai pada dinamika sosial dan politik yang telah terjadi. Karena jika tidak dilihat dari konteks historis semacam ini akan menimbulkan persepsi-persepsi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa seperti ada *stereotype* yang tak berdasar akibat tidak memahami Islam Indonesia secara benar dan bijak. Karangka pemikiran Clifford Greetz yang membagi penduduk Islam Indonesia menjadi dua arah kecenderungan, ‘santri’ dan ‘abangan’ akan menjadi keliru jika dilihat dari konteks historis bangsa bahkan terdapat banyak distorsi dalam memahami Islam Indonesia.⁶ Pembagian penduduk Indonesia kepada dikotomi (atau trikotomi, jika disertakan Priyayi) semacam itu sulit menemukan bukti konkret apabila dihubungkan dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap ajaran agama Islam bagi masyarakat Indonesia. Apa yang diidentikkan dengan istilah ‘abangan’ dalam taraf tertentu juga dapat dikategorikan ke dalam kategori ‘santri’, dan seorang yang dikatakan ‘santri’ tidak sedikit di antara mereka yang melakukan praktek ‘abangan’.

⁵ Azyumardi Azra, ‘Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global’, h. 85.

⁶ Clifford Greetz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013)., bandingkan dengan tulisan M. Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa* (Jakarta: Alfabeta, 2009)., dan Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon* (Jakarta: Logos, 2002).

Karakter *wasatīyah* Islam Indonesia dapat diinisiasi dengan tipikal ajaran Islam yang datang ke Nusantara. Islam yang berkembang di Nusantara pada umumnya berwatak akomodatif terhadap kebudayaan lokal karena disebarkan kalangan sufi yang arif dalam mendakwahkan Islam. Para sufi tidak secara frontal mendeklarasikan Islam tanpa melihat kondisi sosial masyarakat Nusantara yang sudah memunyai kepercayaan lokal. Sikap akomodatif terhadap sistem kepercayaan lokal menjadikan dakwah para sufi perlahan tapi pasti diterima secara umum oleh masyarakat bahkan berkembang secara massif. Karakter *wasatīyah* dalam kasus ini adalah tidak memaksakan kehendak untuk menerapkan ajaran Islam secara *rigid* tanpa melakukan improvisasi dan pengembangan ajaran Islam. Mungkin bisa dijadikan sebagai model karakter *wasatīyah* bagi penyebaran Islam di Nusantara seperti yang diajarkan Wali Songo di tanah Jawa pada abad ke 14-15 M.⁷ Dalam menyebarkan Islam, para wali lebih menggunakan pendekatan budaya dalam mendakwahkan Islam. Unsur budaya setempat tidak seratus persen diubah dan dihapus dalam pemikiran masyarakat, tetapi justru unsur budaya tersebut tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan ajaran Islam seperti dalam kasus *selamatan*. Sekiranya dapat dipahami bahwa perkembangan Islam berlangsung sangat damai dan jauh dari kesan kekerasan, intimidasi, dan segala bentuk pemaksaan kehendak, sehingga Islam yang datang di wilayah Nusantara pada dasarnya diterima masyarakat dengan suka rela.

Karakter *wasatīyah* Islam Indonesia juga dapat ditemukan pada perkembangan Islam pada abad ke 17 M. Sekilas kita dapat melihat bahwa arah pembaruan al-Rānīrī dalam mendakwahkan Islam di wilayah Sumatera berorientasi pada arah ortodoksi dengan bentuk pemahaman Islam yang

⁷ Tulisan yang mengungkap peran dakwah Wali Songo telah dipaparkan Agus Sunyoto, *Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan* (Jakarta: Transpustaka, 2011).

cenderung memusuhi unsur-unsur budaya yang terkontaminasi dengan bentuk pemahaman yang dianggap salah, sebut saja paham wujudiyah Ḥamzah Fansūrī, dengan melakukan pembaruan yang berorientasi kepada syari'at. Namun pada waktu yang hampir bersamaan telah terjadi proses kontekstualisasi Islam dengan realitas lokal di Nusantara. Bentuk kontekstualisasi ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam yang dibawa 'Abd al-Ra'ūf al-Sinkilī, Yusūf al-Makassarī dan 'Abd al-Ṣamad al-Falinbānī, yang memadukan unsur syari'at dan unsur tasawuf ke dalam cara keberagamaan bagi masyarakat Nusantara.⁸ Apabila dikatakan bahwa sebagian konsep wujudiyah yang berkembang di Nusantara cenderung terperangkap pada doktrin tasawuf yang ekstrem sehingga sangat mungkin disalahartikan kalangan masyarakat awam, maka dalam konsepsi perpaduan syari'at dan tasawuf yang diusung ketiga ulama di atas menitikberatkan pada penguatan unsur syari'at sebelum memasuki dimensi tasawuf. Seorang tidak akan sampai (*wuṣūl*) kepada Allah, apabila tidak menjalankan piranti yang dapat menghantarkan kepada-Nya. Piranti tersebut adalah berupa menjalankan segala perintah yang diwajibkan Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, atau dengan kata lain menjalankan syari'at Allah secara benar.

Karakter *wasatīyah* Islam Indonesia paling terlihat ketika para pendiri bangsa (*the founding father*) menggagas bentuk negara. Para pendiri bangsa yang terdiri dari kalangan nasionalis dan Islam sepakat tidak menjadikan agama Islam sebagai asas negara, tetapi berdasarkan Pancasila.⁹ Momentum ini ditentukan melalui dihapusnya tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945, 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya', diganti dengan 'Ketuhanan Yang Maha Esa', dengan melalui

⁸ Kajian secara terinci dapat dilihat dalam Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013).

⁹ Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 48-9.

perdebatan, adu gagasan, dan tentunya usaha kompromis-integratif dari para pendiri bangsa dengan melihat kemajemukan yang terdapat di dalam bangsa Indonesia. *Wasatīyah* ini terpatri dalam Pancasila sebagai *kalimatun sawā*, prinsip-prinsip yang sama atau *common platform* di antara anak bangsa yang majemuk dalam berbagai aspek kehidupan mereka.¹⁰

Aspek kompromis-integratif sudah selayaknya menjadi *ibrah* bagi masyarakat akan sejarah bangsa Indonesia yang dibangun bukan hanya atas dasar *ukhuwah islāmīyah* (persaudaraan sesama umat Islam) tetapi juga *ukhuwah waṭanīyah* (persaudaraan sesama warga negara). Apabila porsi dalam membela *ukhuwah islāmīyah* lebih dominan dan mengindahkan *ukhuwah waṭanīyah* maka sangat dimungkinkan agama Islam akan menjadi ideologi resmi negara seperti layaknya Malaysia dan Iran, karena sejatinya kelompok mayoritas para *founding father* beragama Islam. Tetapi kenyataannya berbeda, di mana yang menjadi ideologi resmi negara adalah Pancasila bukan agama Islam. Ini karena para *founding father* melihat keanekaragaman masyarakat Indonesia, bukan semata Islam tetapi ada agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu yang mendiami wilayah Indonesia. Potret keagamaan demikian menunjukkan akan urgensi *ukhuwah waṭanīyah* bagi bangsa Indonesia sekaligus menyatukan antara pandangan nasionalis dan agamis.

Problem yang serius jika muncul pandangan yang memertentangkan antara nasionalisme dan agama dan pada taraf tertentu ada sebagian kelompok yang menganggap kecintaan akan nasionalisme sebagai bentuk kekafiran, pengikut *taghūt* karena mereka menganggap kecintaan akan agama Islam harus diprioritaskan. Tidak perlu menyebutkan sederet argumen untuk menguatkan statement tersebut, cukuplah kejadian yang tengah menimpa Timur Tengah sebagai contoh. Pertikaian, perebutan kekuasaan, konflik dan

¹⁰ Azyumardi Azra, 'Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global', h. 84.

penindasan yang terjadi di Palestina, Afganistan, Somalia, Irak, Suriah, dan Yaman menjadi bukti bahwa kesamaan dalam agama tidak secara pasti membawa perdamaian dan menyatukan masyarakatnya. Fenomena munculnya kelompok yang mendengungkan konsep negara Islam seperti ISIS yang berhasrat menyatukan muslim dunia dalam naungan sistem khilafah Islamīyah ikut memerparah kemelut di Timur Tengah. Jangan terlalu berharap menyatukan muslim di seluruh dunia jika faktanya antara negara Islam atau bahkan di *intern* negara Islam sendiri tidak terjadi kata sepakat dan sering konflik. Keadaan ini sangat mungkin terjadi akibat menguatnya—dan dianggap prioritas utama—seruan *ukhuwah islāmīyah* di satu sisi sedangkan *ukhuwah waṭanīyah* diindahkan di sisi lain.

Fakta berbeda justru terjadi di Indonesia yang tidak memersoalkan dan memertentangkan antara nasionalisme dan agama. Keduanya terangkai apik dalam satu gugus kesatuan yang integral dan dibungkus dalam formula keagamaan yang arif lagi damai dan jauh dari kesan garang dan kejam. Harus diakui bahwa pertikaian memang terjadi, tetapi hanya pada tatanan lokal dan regional yang tidak menimbulkan tragedi nasional, seperti tragedi konflik di Timur Tengah. Konflik-konflik yang pernah terjadi di Nusantara tersebut justru menumbuhkan sikap dewasa dan matang, seperti secara khusus kita lihat dalam perjalanan dakwah keislaman di Nusantara.

Para pendakwah Islam sejak dulu tidak serta-merta melakukan ‘pembumihangusan’ terhadap kearifan-kearifan lokal yang sudah lama berserakan di Nusantara. Artinya, mereka tidak menganggap bahwa ‘warisan nasional’ yang ada ini perlu dihancurkan lantas diganti secara frontal dengan simbol-simbol keislaman yang literalis. Ini jelas jauh berbeda dengan apa yang dilakukan ISIS, Boko Haram, atau Al-Shabab saat menguasai suatu daerah, lalu melakukan penghancuran terhadap warisan-warisan sejarah yang ada, bahkan kuburan pun jadi sasaran penghancuran. Dari perjalanan

pendakwah Islam di Nusantara ini membuktikan tidak ada pertentangan antara nasionalisme dan ajaran Islam. Mereka menyadari betul bahwa untuk bisa berdakwah, dibutuhkan tanah air yang kondusif.¹¹

Para ulama Nusantara dikenal sebagai cendekiawan berwawasan luas, penulis yang kreatif dan produktif, serta terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, budaya, dan spiritualitas. Mereka adalah agen-agen perubahan. Contohnya Ḥamzah Fanṣūrī, Sham al-Dīn al-Sumatrānī, Nūr al-Dīn al-Rānīrī, ‘Abd al-Ra’ūf al-Sinkilī dan ulama lain. Mereka tidak hanya telah meletakkan pondasi dakwah yang moderat, tetapi juga mampu memberi bukti nyata bagi perjalanan historiografi dakwah Islam di Nusantara yang menampilkan wajah Islam yang jauh dari sikap dan tindakan radikal.

Jelaslah, Islam di Indonesia tidak punya akar radikal. Munculnya radikalisme dan terorisme merupakan hasil adopsi kultur keagamaan yang datang dari luar. Katakanlah, Islam yang radikal lebih merupakan ‘produk impor’, layaknya sebuah produk yang diimpor dari luar negeri dan kemudian diujakan di dalam negeri. Arus komunikasi global dewasa ini yang memungkinkan orang begitu mudahnya menyerap paham-paham luaran menjadi fakta adanya pergulatan ‘model baru’ dalam memaknai ajaran Islam.¹²

Pada kasus lain, kadang karakter *wasatīyah* Islam Indonesia terejawantahkan dalam bentuk berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Al-Washliyah, Nahdlatul Wathan (NW), dan organisasi yang mengusung ide *wasatīyah* lainnya. Organisasi yang disebutkan merupakan preseden dan prototype keagamaan di Indonesia, di mana karakter yang mendominasi berupa sikap moderat dalam hal pemahaman keagamaan dan praksis/tindakan keagamaan. Sebagai

¹¹ Said Aqil Siroj, ‘Mendahulukan Cinta Tanah Air’, dalam *Kompas*, 11 April 2015.

¹² Said Aqil Siroj, ‘Mendahulukan Cinta Tanah Air’, dalam *Kompas*, 11 April 2015.

contoh, peran NU dalam menjaga karakter *wasatīyah* Islam Indonesia dibakukan, dalam beberapa tahun belakangan, dengan mengemukakan istilah Islam Nusantara. Konsep Islam Nusantara yang diusung NU merupakan bentuk penghayatan dan artikulasi pemahaman agama Islam dalam bidang sosial dan budaya yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia Islam lainnya. Bisa dikatakan bahwa Islam Nusantara merupakan bentuk pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam sebagai hasil dialektika antara *naṣ*, *syari'at*, dan *'urf* yang ada di Nusantara.¹³ Sifat distingsif semacam ini dapat diklaim hanya ada di Nusantara semata, tidak di daerah Islam lainnya.

Eksistensi organisasi kemasyarakatan seperti NU yang memiliki karakteristik *wasatīyah* ikut andil besar dalam menjaga iklim keberagaman di Indonesia yang toleran dan damai. NU beserta organisasi kemasyarakatan yang lain akan selalu menjaga sikap *wasatīyah* eksis di tengah masyarakat. Segala sikap dan ideologi yang berusaha merongrong kedaulatan negara akan segera ditangkal dan tidak dibiarkan berkembang. Ini karena tidak sesuai dengan karakteristik *wasatīyah* negara Indonesia. Maka tidak mengherankan apabila terdapat ideologi dari suatu kelompok yang mengusung pemberlakuan hukum Islam dan menerapkan ide Khilāfah Islāmīyah ditanggapi pemerintah dan segenap organisasi kemasyarakatan dengan sikap tegas dan terancam dibubarkan karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila.

Karakter *wasatīyah* Islam Indonesia yang moderat dan toleran barangkali bisa dilihat dari kerangka pemberlakuan prinsip ajaran bermadhhab. Dalam bidang teologi, Islam Indonesia berpatokan kepada teologi Ash'arīyah, dalam bidang fikih berafiliasi pada madhhab Shāfi'īyah

¹³ Keterangan lebih lanjut baca Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan, 2015).

dan dalam bidang tasawuf mengacu pada pemikiran al-Ghazālī. Ketiga nomenklatur yang menginisiasi bentuk pemahaman Islam Indonesia dikenal memiliki corak pemikiran yang moderat. Teologi Ash‘ariyah merupakan hasil kompromi dan jalan tengah antara rasionalisme Mu‘tazilah dan paham skripturalisme ahli ḥadīth. Porsi penggunaan nalar sedemikian mungkin ditekan oleh ajaran yang terdapat dalam *naṣ* sehingga tidak terjerumus pada jurang liberal atau ekstrem kiri. Begitu juga akan kita dapati pada madhhab Shāfi‘ī dan tasawuf al-Ghazālī yang menekankan aspek *wasatīyah* dalam memahami teks-teks dan perilaku keagamaan. Kerangka pemikiran yang demikian menumbuhkan sikap moderat bagi masyarakat Indonesia dalam melihat dinamika sosial dan budaya yang berkembang.

Azyumardi Azra mengatakan bahwa organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya, memainkan peran penting dalam kebangkitan ‘Islam kultural’, yang pada gilirannya memunculkan fenomena ‘kebangkitan Islam’ atau renaisans Islam Indonesia. Apa yang disebut ‘kebangkitan Islam’ itu secara lahiriah biasanya ditandai oleh kian meluasnya pemakaian jilbab di kalangan wanita, munculnya lembaga-lembaga baru Islam semacam Bank Muamalat, Bank Syariah dan lembaga filantropi Islam, meningkatnya jumlah jamaah haji, semakin banyaknya jumlah masjid yang bagus dan megah, meningkatnya popularitas lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya sekolah Islam, madrasah dan pesantren, sampai pada munculnya aspirasi di kalangan muslim untuk penegakkan ‘syari’ah’.¹⁴

Mengutip pendapat Giora Eliraz, Azra mengatakan bahwa watak kebangkitan Islam Indonesia adalah unik, terutama jika dibandingkan dengan Islam Timur Tengah. Jika di Timur Tengah umumnya ‘kebangkitan Islam’ ditandai dengan meningkatnya kesalehan dan konservatisme berbarengan dengan penguatan Islam politik dengan ideologi fundamentalisme—bahkan

¹⁴ Azyumardi Azra, ‘Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global’, h. 86.

militansi dan radikalisme—‘kebangkitan Islam Indonesia’ ditandai dengan peningkatan toleransi dan penerimaan kian meluas atas gagasan-gagasan dasar pluralisme keagamaan.¹⁵ Contoh bentuk penerimaan dari gagasan pluralisme keagamaan dapat dilihat dari sikap inklusif masyarakat terhadap keanekaragaman perilaku keagamaan dengan cara saling menghormati antar pemeluk maupun beda agama.¹⁶

Watak kebangkitan Islam Indonesia yang unik dan khas itu diperkuat oleh peran mediasi yang dimainkan organisasi-organisasi besar Islam, khususnya NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam *wasatīyah* lainnya. Semua organisasi tersebut—di tengah perubahan politik 1999, Pemilu serta Pilpres 2004, 2009, 2014, pemilu Gubernur DKI 2017 dan yang baru-baru ini terjadi aksi bela Islam 212, 313, 412 dan aksi bela ulama 96—tetap dalam komitmen mereka, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan *common platform* sekaligus landasan utama pluralisme masyarakat Indonesia. Memang ada segelintir orang di dalam NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam *wasatīyah* lain berusaha memperbesar peran Islam dalam tatanan politik Indonesia, tetapi mereka umumnya secara esensial moderat.¹⁷

Kontribusi Islam Indonesia dalam Ranah Global

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sikap dan karakteristik *wasatīyah* Islam Indonesia yang memosisikan agama dan nasionalisme sebagai dua entitas yang dapat disinergikan. Bentuk sinergitas antara keduanya termasuk dalam bentuk Pancasila yang mengakui keanekaragaman agama, adat dan kebudayaan lokal masyarakat dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ajaran Islam.

¹⁵ Azyumardi Azra, ‘Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global’, h. 86.

¹⁶ Konsep pluralisme dalam al-Qur’an secara mendetail dapat dilihat dalam Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an* (Depok: KataKita, 2009).

¹⁷ Azyumardi Azra, ‘Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global’, h. 86.

Relasi antara agama dan negara dianggap sudah selesai dengan mengedepankan nasionalisme Indonesia tanpa membedakan agama, suku, dan golongan dalam bernegara. Sebagai satu contoh, NU tidak tertarik untuk melakukan formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sebagaimana pemberlakuan bukuum Islam dalam ruang publik, tata negara, dan administrasi negara, termasuk hukum privat keluarga seperti perkawinan, waris, dan perbankan. NU sendiri sebelum masa kemerdekaan melalui muktamar ke-11 pada 1936 di Banjarmasin telah mengukuhkan Indonesia sudah sebagai negara Islam karena masyarakatnya mayoritas beragama Islam.¹⁸

Bagi kelompok Islamisme seperti HTI, nasionalisme dianggap sebagai primordialisme dan fanatisme kebangsaan (*'aṣabīyah*) yang dihukumi haram. Pendapat ini menjadi pandangan politik mayoritas kelompok Islam radikal di Indonesia. Kelompok ini berpegang teguh pada prinsip kesatuan umat yang didasarkan atas ikatan akidah atau ideologi keislaman, bukan ikatan kebangsaan. Karena nasionalisme dianggap sebagai ikatan kebangsaan bukan pada ikatan akidah maka sistem negara yang mengadopsi nasionalisme dianggap sebagai bukan berasal dari Islam dan tentunya haram.¹⁹

Ideologi kebangsaan atau nasionalisme jelas memiliki dasar dalam al-Qur'an dengan adanya inklusivitas untuk saling mengenal identitas satu dengan yang lain. Tentu kebangsaan tersebut akan ditemui adanya kebhinekaan dalam hal agama, suku, warna kulit, status sosial, dan perbedaan lain dengan dibatasi penghargaan melalui ketakwaan, yaitu memanusiakan manusia dengan tidak saling melecehkan. Titik temu antara kebangsaan dengan keislaman dapat dilihat pada prinsip yang harus dijunjung. Berbangsa

¹⁸ Jimmy Oetoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa* (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 167-8.

¹⁹ <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/31/nasionalisme-dan-separatisme-haram/>, diakses pada 13 Juni 2017.

menurut adanya persatuan masyarakat (*ummah*), perlindungan hak masyarakat (*'adalah*), prinsip permusyawaratan (*shurā*), dan persamaan perlakuan (*musāwah*).

Nasionalisme merupakan tampilan konsep yang dibangun Nabi Muḥammad untuk memerhatikan kepentingan persatuan masyarakat (*al-ummah al-wāḥidah*). Masyarakat muslim di Indonesia sejak perkembangannya sudah mengenal makna persaudaraan bukan sekadar saudara atas dasar sesama pemeluk agama (*ukhuwah Islāmīyah*), tetapi juga persaudaraan sebangsa (*ukhuwah waṭanīyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basharīyah*). Hal demikian dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan ikatan Pancasila. Aksi kekerasan atas nama agama yang masih marak terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa sikap dan perilaku sebagian masyarakat Indonesia tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Masyarakat cenderung memilih aksi kekerasan atau adu kuat dalam menghadapi perbedaan. Tindakan demikian menyuburkan intoleransi beragama, pembakaran rumah ibadah, dan frustrasi beragama dengan ideologisasi Islam menjadi jaringan terorisme.

Masyarakat muslim Indonesia banyak yang tidak memandang bahwa Pancasila adalah prinsip beragama Islam. Dalam epistemologi hukum Islam (*uṣūl fiqh*), Pancasila sama halnya dengan *al-kulliyat al-khams*, yaitu prinsip dasar tujuan pemberlakuan hukum Islam. Panca prinsip hukum Islam tersebut adalah perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁰

Al-kulliyat al-khams dalam konteks Indonesia sudah tercermin pada rumusan Pancasila. Sila-sila dasar negara yang merupakan asli produk

²⁰ Konsep ini ditemukan dalam berbagai kitab fikih klasik seperti Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Muṣtaṣḥfā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011).

budaya bangsa Indonesia, sudah memberikan perlindungan agama pada sila pertama. Perlindungan jiwa dan aspek-aspek kemanusiaan pada sila kedua. Perlindungan keturunan sebagai bentuk hak kewarganegaraan dalam sila ketiga. Perlindungan akal dan kebebasan berserikat berkumpul dalam sila keempat. Sedangkan perlindungan harta serta akses sumber ekonomi tercermin dalam sila kelima.

Pancasila merupakan pondasi norma atas hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Hal demikian berimplikasi pada pemberlakuan dan penerapan syariat Islam tidak boleh berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawarakatan, dan keadilan. Hukum Islam ditempatkan sebagai sumber pembentukan hukum nasional yang berinteraksi dengan agama-agama lain. Pancasila sebagai mazhab berkebangsaan ditempatkan untuk meneguhkan Islam di Nusantara guna mengembangkan peradaban Indonesia dan peradaban dunia yang damai.

Selama ini di Indonesia tidak ada permasalahan yang antara Islam dan demokrasi. Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan langsung 1999, 2004, 2009, dan 2014 secara damai merupakan bukti kompatibilitas Islam dengan demokrasi di Indonesia. Atas keberhasilan ini, banyak kalangan yang mengklaim bahwa Indonesia kini menjadi model sangat baik dalam hal hubungan antara Islam dan demokrasi. Dengan demikian Indonesia telah memberi contoh kepada dunia muslim lainnya tentang bagaimana demokrasi relevan dengan Islam.

Berbagai penelitian dan survei tentang demokrasi di Dunia Islam umumnya menyimpulkan bahwa terdapat defisit demokrasi (*democracy deficit*) dibanyak negara muslim. Meski banyak negara muslim menyatakan diri sebagai ‘negara demokrasi’, dalam prakteknya mereka jauh dari demokrasi, bisa karena rezim yang berkuasa adalah rezim-rezim diktatorial dan otokratik atau bisa juga karena sistem politik yang berlaku adalah satu

partai atau *one single party system* dan, lebih parah lagi, bisa jadi karena sistem politiknya yang monarki-konstitusional hanya memberi sangat sedikit ruang bagi ekspresi demokrasi. Akan tetapi, tidak ada defisit demokrasi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam berbagai penelitian, Indonesia disebut sebagai sebuah negara muslim di mana demokrasi dalam masa pasca-Suharto terlihat tumbuh dengan cepat. Pada awalnya memang terlihat tanda-tanda kurang meyakinkan bagi pertumbuhan demokrasi di negeri ini, yang menunjukkan gejala *too much democracy*. Akan tetapi, hanya dalam tempo sekitar satu dasawarsa, konsolidasi dan pendalaman demokrasi terus berlanjut di Indonesia.²¹

Berbeda dengan kasus yang ada di Indonesia mengenai hubungan antara posisi agama dan negara yang sinergi, justru di banyak bagian dunia Islam terjadi tarik menarik antara posisi keduanya. Menurut Azra, tarik menarik tersebut dapat dilihat dari keragaman bentuk negara yang ada di Dunia Muslim. *Pertama*, negara sekuler model Turki; *kedua*, negara modern yang tidak menjadikan Islam sebagai agama negara, tetapi mengakomodasi agama seperti Indonesia; *ketiga*, model *dawlah islāmīyah* tradisional yang menjadikan al-Qur'an sebagai konstitusi, seperti Arab Saudi; *keempat*, negara Islam modern yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara seperti Malaysia dan Iran; *kelima*, model *khilafah*—belum ada pada masa kontemporer—yang menjadi orientasi organisasi-organisasi atau kelompok muslim tertentu seperti Hizbut Tahrir.²²

Pengalaman Indonesia dalam memberdayakan sistem demokrasi dan dianggap berhasil, turut mendapat sorotan di mata dunia. Tentu, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sekaligus negara yang menerapkan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan

²¹ Azyumardi Azra, 'Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global', h. 87.

²² Azyumardi Azra, 'Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global', h. 88.

Amerika, karakteristik *wasatīyah* Islam Indonesia yang menyebarkan ide moderasi diharapkan mampu memainkan peranan lebih besar dan vital di dunia internasional. Bahwa pengalaman muslim Indonesia dalam memahami dan menghayati kehidupan keagamaan, sosial, politik, maupun budaya patut menjadi acuan bagi muslim di dunia Islam lain, khususnya di Timur Tengah yang terkesan ‘tidak akurat’ dalam memandang kehidupan keagamaan dan realitas sosial yang berkembang.

Karakter *wasatīyah* Islam Indonesia tidak akan eksis apabila tidak terdapat agen perubahan yang berperan sentral sekaligus konsisten dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Agen tersebut adalah para ulama atau kyai. Ulama dan kyai yang ada di Indonesia, sebagaimana disitir Said Aqil Siraj, memiliki kontribusi besar kepada kemaslahatan orang banyak.²³ Bisa dikatakan keadaan suhu sosial politik yang kondusif di Indonesia karena peranan ulama dalam menangkal berbagaimacam kerusuhan. Dengan jargon *tark al-mafāsīd awla min jalb al-maṣāliḥ*, ulama senantiasa mencegah kemungkaran dan berbagai praktek makar yang dapat mencederai keutuhan bangsa Indonesia. Terbukti ulama-ulama baik yang ada di kota maupun desa mampu meredam konflik yang terjadi. Belakangan terjadi konflik yang kisruh karena ketegangan suhu politik pasca Ahok didakwa telah menistakan agama Islam, silih berganti terjadi konflik yang berujung aksi demonstrasi. Aksi tersebut mampu diredam dan tidak sampai menimbulkan keadaan yang genting, tidak lain adalah berkat peran ulama yang bersinergi dengan pemerintah dalam menanggulangi setiap masalah. Maka, sikap moderat *ala* Islam Indonesia ini sudah saatnya diekspor ke mancanegara.

Ada beberapa langkah yang perlu menjadi pijakan untuk mendiseminasikan karakter *wasatīyah* Islam Indonesia dikancah internasional. *Pertama*, perlu adanya konsolidasi dan pemberdayaan Islam

²³ Said Aqil Siroj, ‘Mendahulukan Cinta Tanah Air’, dalam *Kompas*, 11 April 2015.

wasatīyah di Indonesia menyangkut penguatan sikap dan rekonsiliatinsi dalam menghadapi berbagai gejala keagamaan yang muncul di kalangan umat Islam Indonesia sendiri. Karena sebelum melangkahkan kaki lebih jauh dan menjajakkan karakter *wasatīyah* ini di luar Indonesia, maka menjadi niscaya melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu. Ini sangat perlu dilakukan mengingat dewasa ini mulai tumbuh dan sudah sangat terasa terdapat kecenderungan menguat-nya pemahaman keislaman yang ‘hitam-putih’, literal, dan radikal.²⁴

Kedua, perlu adanya usaha penguatan jaringan (*networks*) Islam *wasatīyah* baik pada tataran nasional dan regional maupun internasional menjadi kebutuhan prioritas. Penguatan jaringan tersebut berarti memfasilitasi proses yang memungkinkan Islam *wasatīyah* Indonesia dapat memiliki jaringan yang terpadu secara internal, dan pada saat yang sama memunyai hubungan dengan organisasi, kelompok-kelompok *civil society*, dan lembaga swadaya masyarakat di Dunia Muslim maupun lingkungan yang lebih luas. dengan demikian, Islam *wasatīyah* di negeri ini dapat menjadi sebuah gerakan yang memiliki dimensi internasional.

Ketiga, perlu adanya dukungan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam dalam memerluas ekspos Islam *wasatīyah* di tanah air ke dunia internasional. Dalam beberapa tahun terakhir hal ini sudah mulai dilakukan dengan mensponsori berbagai konferensi internasional melibatkan NU dan Muhammadiyah. Konferensi-konferensi tersebut menghadirkan banyak pemimpin, ulama, dan pemikir muslim yang dilengkapi dengan para ahli dari

²⁴ Greg Fealy, ‘Hizbut Tahrir Indonesia: Seeking a Total Islamic Identity’, dalam Shahram Akbarzadeh dan Fethi Mansouri (ed.), *Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in the West* (New York: Tauris Academic Studies, 2007), h. 156-7.

kalangan non-muslim yang pada gilirannya memungkinkan terjadinya pertukaran keiluan dan terjadinya jaringan yang lebih kuat.²⁵

Penutup

Karakteristik *wasafiyah* Islam Indonesia merupakan prototype proporsional yang bisa ditawarkan kepada masyarakat global demi terciptanya budaya toleransi dan damai. Di Tengah kurang kondusifnya suasana politik di Timur Tengah, dan masih terdapat benang kusut yang sulit terurai terkait hubungan antara agama dan negara diberbagai dunia Islam, keberhasilan Indonesia dalam menerapkan sistem demokrasi yang sanggup menyinergikan antara agama dan negara, bisa menjadi preseden dan tawaran alternatif bagi peradaban dunia. Urgensi diseminasi karakter *wasafiyah* Islam Indonesia ini karena dalam berbagai aspeknya, baik dalam aspek pemikiran maupun tindakan akan menampakkan wajah Islam yang ramah atau dikenal dengan nama Islam moderat yang tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2013.

_____, 'Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global', dalam Majalah *Prisma*, Vol. 29, No. 4, Oktober 2010.

Fealy, Greg, 'Hizbut Tahrir Indonesia: Seeking a Total Islamic Identity', dalam Shahram Akbarzadeh dan Fethi Mansouri (ed.), *Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in the West*. New York: Tauris Academic Studies, 2007.

Fuller, Graham E., *Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam? Sebuah Narasi Sejarah Alternatif*. Bandung: Mizan, 2014.

²⁵ Azyumardi Azra, 'Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global', h. 90.

- Ghazali, Abd. Moqsih, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: KataKita, 2009.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, *Al-Muṣṭashfā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2011.
- Greetz, Clifford, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Maarif, Syafii, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*. Jakarta: Logos, 2002.
- Oetoro, Jimmy, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Pranowo, M. Bambang, *Memahami Islam Jawa*. Jakarta: Alvabet, 2009.
- Sahal, Akhmad dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan, 2015.
- Siroj, Said Aqil, ‘Mendahulukan Cinta Tanah Air’, dalam *Kompas*, 11 April 2015.
- Sunyoto, Agus, *Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan*. Jakarta: Transpustaka, 2011.